

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Y.H. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pena Grafika.
- Anatami, D. (2016). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Anatami, D. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan dan Outsourcing*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asikin, Z. et. al. (2010). *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiono, A.R. (2020), *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. (2004). *Pokok Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, M. (2007). *Dinamika Teori Hukum*,Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, A.M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hernoko, A.Y, (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Group.
- Husni, L. (2010). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Isnaeni, M. (2017). *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Khairani (2021). *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*. Depok: Rajawali Pers
- Khakim, A. (2017). *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Khakim, A. (2020). *Dasar Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- M. Sadi Is dan Sobandi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maiyestati. (2025). *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*. Padang: LLPM Universitas Bung Hatta.
- Marzuki, P.M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhtaj, M.E. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, B.J. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution,A.D. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan:Perspektif Undang-undang Cipta Kerja 2023*. Malang:Literasi Nusantara.
- Noval, S.M.R. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan*.Bandung: PT Refika Aditama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Ramli, L. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan* Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Romli, S.A. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Salim H.S. (2004). *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. (2012). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Setiono. (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soepomo, I. (1990). *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan.
- Soepomo, I. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (1986). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sulistyowati. (2020). *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sutedi, A. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thamrin ,S. (2018). *Penagakan HAM Tenaga Kerja Indonesia*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Wijayanti, A. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. (2021). *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Red & White Pubblishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah Dan/Atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Jurnal

Anggraini, S.D. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Atas Penahanan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Pengusaha, *Jurnal Kajian Konstitusi* Volume. 2, No. 1.

Hakim, M. *et. al.* (2025). Restorative Justice Dalam Hukum Ketenagakerjaan: Jalan Baru Perlindungan Bagi Pekerja Harian. *Journal Juridish* Volume. 3, No. 2.

Hanafing, M dan Nugroho, A. (2018). Analisis Yuridis Tentang Penahanan Ijazah Atasan Oleh Pengusaha Akibat Kesalahan Bawahan. *Jurnal Novum* Volume. 2, No. 4.

- Hidayah, A. (2018). Ketentuan Penahanan Ijazah Pekerja Sebagai Syarat Tertentu Dalam Perjanjian Kerja. *Jurnal Undiksha* Volume. 16, No. 2.
- Indriani, M. (2016). Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Gema Keadilan* Volume 3, No. 1.
- Khandi *et. al.* (2025). Implikasi Yuridis Penahanan Ijazah Oleh Pemberi Kerja Dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economics, and Legal Theory* Volume. 3, No. 2.
- Pratama, D.S *et. al.* (2024). Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan. *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume. 1, No. 4.
- Putri, C.P.H. (2025). Keberadaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Pasca Pengaturan Larangan Penahanan Ijazah Oleh Kementerian Ketenagakerjaan. *Jurnal Wijaya Putra Law Review* Volume. 4, No. 2.
- Sitohang, M. (2024). Menguji Keadilan Dalam Penerapan Hak Pensiun Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Honeste Vivere Journal* Volume. 34, No. 1.
- Sitohang, M. *et. al.* (2025). E-Court Sebagai Realisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Murah Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Honeste Vivere Journal*. Volume. 35, No. 2.
- Sunarno. (2009). Beberapa Masalah Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Solusinya. *Jurnal Wacana Hukum* Volume. 8, No. 2.
- Tobing, L. *et. al.* (2025). Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Perdata sebagai Tagihan Sederhana. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume. 14, No. 1.
- Wibowo, B.S *et. al.* (2021). Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). *Jurnal Notarius* Volume. 14, No. 2.
- Zulkifli, A. (2024). Tinjauan Yuridis Praktek Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pemberi Kerja Dalam Kesepakatan Perjanjian Kerja. *Jurnal Wasaka Hukum* Volume. 12, No. 2.

Internet

(2024, 8 Agustus). *Apa yang Dimaksud dengan PKWT*. Diambil kembali dari Website BPJS Ketenagakerjaan: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18193/artikel-apa-yang-dimaksud-dengan-pkwt>.

(2025, 22 Mei). *Menteri Ketenagakerjaan Larang Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan*. Diambil kembali dari Website Kementerian PANRB: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menteri-ketenagakerjaan-larang-penahanan-ijazah-oleh-perusahaan>.

Christiawan, R. (2025, 20 Januari). *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian*. Diambil kembali dari Website Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-keadaan-dalam-hukum-perjanjian-lt678e813731c32/>.

Darmawan, C.K. (2025, 18 Mei). *Ijazah Ditahan Pengusaha, Apa Boleh Demikian?*. Diambil kembali dari Website KunciHukum: <https://www.kuncihukum.com/artikelpage/102/ijazah-ditahan-pengusaha-apa-boleh-demikian>.

Noviar, I. (2022, 28 Maret). *Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Diambil kembali dari Website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sanggau: <https://disnakertrans.sanggau.go.id/mediasi-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial/>.

Oktavira, B.A. (2023, 5 Juli). *5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan*. Diambil kembali dari Website Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-dan-contoh-jaminan-kebendaan-lt518f8c34e5c67/>

Purnomo, S. (2025, 10 November). *Menunjukkan Bukan Membuktikan: Mengapa Ijazah Jokowi Harus Diuji di PTUN?*. Diambil kembali dari Website SiagaIndonesia: <https://siagaindonesia.id/menunjukkan-bukan-membuktikan-mengapa-ijazah-jokowi-harus-diuji-di-ptun/>.

Randi, Y. (2025, 13 November). *Aspek Hukum Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Di Indonesia*. Diambil kembali dari Website Rechtsvinding: dalam <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1049>.

Rizky, M. (2025, 20 November). *Ijazah-Gaji Ditahan Masuk”Lapor Menaker”*, *Ini Kasus Aduan Terbanyak* . Diambil kembali dari Website CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251120181326-4-687194/ijazah-gaji-ditahan-masuk-lapor-menaker-ini-kasus-aduan-terbanyak>.

Sabilaa, S.I. (2022, 25 Maret). *Sumber Hukum: Pengertian, Ciri, hingga Jenisnya*. Diambil kembali dari Website Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6000149/sumber-hukum-pengertian-ciri-hingga-jenisnya>.

